



**PERTANYAAN & MASUKAN**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI**  
**RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI BERSAMA MENTERI PERTANIAN**  
**Rabu, 25 Agustus 2021**



**Disampaikan oleh** : Dr. Ir. Hj. Endang S Thohari, DESS, M.Sc  
**No Anggota** : A - 84

-----

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam Sejahtera Kita Untuk Kita Semua*

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

*Salam Indonesia Raya...!*

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian dan Jajarannya yang berbahagia.**

1. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas prestasinya mendapat penilaian opini BPK **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Kami Fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada Menteri Pertanian memberikan perhatian serius dan melakukan upaya perbaikan terkait adanya catatan tentang Penyaluran belanja subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang ternyata belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program dan belum sepenuhnya efektif.

2. Realisasi anggaran kementan per per 21 agustus 2021 sebesar 48,35% ditambah dengan outstanding kontrak sebesar 14,01%. Realisasi anggaran ini masih belum maksimal walaupun kalau digabung dengan outstanding kontrak maka mencapai 62,36%. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait dengan rendahnya realisasi tanpa melihat realisasi outstanding kontrak. Hambatan apa yang dihadapi sehingga realisasinya rendah.
3. Realisasi kegiatan utama Kementan sampai 21 agustus yang rendah adalah pengembangan padi sebesar 52,95%. Kendala apa yang dihadapi sehingga pengembangan padi ini masih rendah realisasinya.
4. Rancangan pagu anggaran Kementan tahun 2022 sebesar Rp. 14.451.749.428.000. Menurut kami anggaran ini kecil bila kita melihat kontribusi riil sektor pertanian pada saat kondisi covid-19 ini yang sangat bagus. Fraksi Partai Gerindra mendukung peningkatan anggaran Kementan sehingga program-program yang terkait dengan kebutuhan riil petani, pekebunan dapat ditingkatkan lagi.
5. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan konkrit kepada Kementerian Pertanian terutama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terkait dampak *refocusing* anggaran terhadap program-program berkaitan dengan bantuan masyarakat, dimana Dinas Pertanian sudah mengeluarkan CPCL seperti kegiatan Irigasi, namun di triwulan keempat tiba-tiba terkena refocusing. Hal ini menyebabkan banyak petani dan poktan/gapoktan sangat kecewa.
6. Hasil **panen komoditas florikultura yang tidak terserap pasar** selama Pandemi Covid-19 menjadi beban kerugian di masyarakat pembudidaya. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta Bapak Menteri Pertanian menugaskan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencari format penyelesaiannya supaya pelaku budidaya florikultura mampu terus bertahan.

7. Diketahui, periode Januari sampai Juni 2021 ini, ekspor Porang Indonesia sudah mencapai 14.8 ribu ton, meningkat 160 persen dibanding semester pertama pada 2019 yang mencapai jumlah 5,7 ribu ton. Fraksi Partai Gerindra meminta Menteri Pertanian dan jajarannya khususnya Ditjen Tanaman Pangan untuk **lebih serius mendorong sektor usaha produksi budidaya perorang** melalui peningkatan peran penyuluh dalam melakukan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis sehingga akses pemasaran kepada pembudidaya guna mendorong Indonesia **sebagai eksportir lima besar dunia**, serta mendukung pengembangan hilirisasi budidaya porang Indonesia sehingga nilai tambahnya semakin besar.
  
8. Ramai diberitakan terkait perunggasan yang masih berpolemik. Adanya kelompok asosiasi Unggas ,hanya karena ingin menyuarakan dan mengadu kepada Presiden, malahan berujung di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Hal ini dipicu **harga Ayam Hidup yang hancur hingga Rp. 9.000/kg**, jauh dibawah Harga Pokok Produksi (HPP). Meski Pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock, namun HPP ayam hidup tetap hancur. Fraksi Partai Gerindra meminta Bapak Menteri Pertanian khususnya Ditjen PKH menjadikan sektor perunggasan ini sebagai skala prioritas rencana kerja dan **lebih berpihak kepada Peternak Unggas Mandiri**. Pemerintah segera mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, jangan sampai Peternak Unggas Mandiri /Peternak kecil dibiarkan mati perlahan karena kalah bersaing dengan Integrator yang sudah mengambil keuntungan dari hulu hingga hilir. Fraksi Partai Gerindra mendesak Pemerintah mengambil langkah-langkah Integratif dengan semua stakeholder terkait, agar Harga LB minimal di HPP Peternak Rakyat Mandiri sebesar Rp. 20.000/kg.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional mengamanatkan Badan Ketahanan Pangan Kementan beralih ke Badan Pangan Nasional, namun pagu anggaran tahun 2022 masih terdapat Badan Ketahanan Pangan, apakah itu artinya Badan Pangan Nasional tidak terbentuk tahun depan? kami minta penjelasannya
  
10. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Pertanian untuk mendorong segenap jajarannya agar usulan DAK tahun 2022 senilai Rp. 2,2 triliun agar benar-benar dimanfaatkan untuk program DAK Fisik dan Non Fisik Sektor Pertanian dan Pangan khususnya kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat padat karya , karena amat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, harapannya kesejahteraan petani dan kemandirian pangan antardaerah dapat makin merata berbasis potensi lokal. Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan program apa yang dikembangkan untuk 288 kota/kabupaten dan dimana lokasi DAK Fisiknya?
  
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rewiu BPK atas dokumen perjanjian kerjasama penangkaran dengan mitra kelompok tani/petani penangkar diketahui bahwa Format Perjanjian PT. PERTANI (Persero) tidak seragam. Unit Pengelola Benih (UPB) satu dengan yang lainnya tidak memiliki format yang sama baik struktur perjanjian maupun substansi pengaturan perjanjian. Fraksi Partai Gerindra meminta BUMN segera membenahi pengelolaan kegiatan bidang usaha perberasan khususnya Standarisasi Calon Benih Kering Sawah (CBKS), agar terdapat kesamaan standar tentang kadar air, penetapan standar kadar kotoran, serta butir klausul pemotongan harga atas rafaksi menjadi seragam, demikian juga pedoman tentang tata cara penagihan piutang benih sumber yang dipinjamkan kepada penangkar, tidak merugikan petani.

*(sumber : Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap BUMN Bidang Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, IHPS II Tahun 2020)*

12. Program Pengembangan kawasan perkebunan Tahun 2021 yang digawangi oleh Ditjen Perkebunan Kementan RI perlu dievaluasi kembali, sebagai misal Pengembangan Kawasan Benih Kelapa Dalam seluas 50 Ha di Kabupaten Paser mengalami kesulitan menemukan CPCL, karena tahun sebelumnya wilayah tersebut telah menerima program yang sama. Kendala lainnya pada pengembangan kawasan bibit/benih Lada seluas 10 Ha di wilayah Kutai Kertanegara, menyisakan persoalan dan kekecewaan pekebun, karena hanya mampu bertumbuh 25% saja, hal ini disebabkan pada saat diberikan ke petani, benih tersebut belum siap tanam. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Perkebunan untuk memperhatikan kebutuhan riil petani di lapangan dan tidak hanya menetapkan pemetaan berdasar kebijakan pusat semata, sekaligus Ditjen Perkebunan secara serius dan berlanjut melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatannya, agar program-program dapat tepat sasaran dan tepat guna.

(sumber: LKPP dan IHP Semester II TA 2020\_DPR RI)

13. Ketersediaan pangan di masa pemberlakuan PPKM khususnya terkait dengan sebaran stok pangan strategis nasional minggu-III Agustus 2021 terbilang masih banyak yang belum terpenuhi sehingga mengalami kebutuhan stok pangan dalam hitungan ton dari masing-masing pangan pokok yang menjadi strategis nasional, seperti beras yang masih membutuhkan 585.371 ton, jagung 314.166 ton, dan pangan lainnya. Maka dari itu, bagaimana strategi dari Kementerian Pertanian agar ketersediaan pangan di Indonesia dapat terpenuhi seutuhnya agar tidak adanya lagi kekurangan stok kebutuhan per ton dari masing-masing pangan tersebut?

14. Berkaitan Isu Dapil Kaltim : Menyikapi realisasi anggaran Kementan tahun 2020 sebesar 95,61% patut diberikan apresiasi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 88,97%. Namun demikian masih banyak permasalahan dilapangan terkait dengan bantuan, salah satunya adalah pemberian bantuan benih dan bibit tanaman perkebunan dimana pada tahun 2020 di Kutai Kertanegara kegiatan pemberian bibit/benih lada seluas 10 ha mendapatkan protes dari petani/pekebun karena bibitnya yang berhasil

tumbuh hanya sekitar 25%. Hal ini disebabkan oleh media tumbuhnya lebih banyak pasir sehingga pada saat diberikan kepada petani bibit dalam kondisi belum siap ditanam. Oleh sebab itu kami meminta dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga program tersebut tepat sasaran dan tepat guna.

15. Terlihat dari data kementan di beberapa daerah kekurangan Cabe namun dilain sisi harga cabe dilapangan jatuh, bahkan menurut laporan yang kami terima dari petani di Jawa Timur seperti Kediri, Jember, Lamongan dan Ngajuk harganya dibawah Rp 6000/Kg, kami minta solusi dari Kementerian Pertanian
16. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Bulan Juli 2021 sebesar 103,48. Nilai NTP tersebut turun 0,11 % dibandingkan bulan sebelumnya dan yang paling menyedihkan NTP tanaman pangan masih di bawah batas impas 100, yakni berada di 96,31 dan ini sudah terjadi mulai Februari 2021 dan yang lebih mengherankan adalah pada Triwulan II tahun 2021 Tanaman Pangan mengalami kontraksi pertumbuhan 8,16 persen berbeda dengan Triwulan I atau bahkan pada tahun 2020 yang masih tumbuh positif, kami minta pemerintah memiliki Langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan Petani tanaman pangan.
17. Kebutuhan akan kedelai dengan harga yang melambung tinggi dan produksi yang berkurang menyebabkan tiap tahun dilakukan impor, untuk meminimalisir impor ini maka kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada kementerian pertanian untuk melakukan budidaya terhadap kacang koro pedang dimana dapat dijadikan bahan baku tempe, susu, tepung pengganti terigu, dan kegiatan pengolahan dari kacang koro pedang berkontribusi pada diversifikasi pangan, disamping itu tanaman ini dapat menghasilkan pupuk hijau sebanyak 40 – 50 ton/ha.

18. Presiden Jokowi meminta agar generasi muda untuk terjun kedalam dunia pertanian oleh sebab itu kementan harus membuat Strategi yang lengkap dari mulai hulu sampai hilir, Selain menjaring pemuda yang sudah berusaha menjadi duta petani milenial, Kementan juga harus bisa melahirkan petani muda baru dengan menyiapkan Pendampingan, Sarana Produksi, Modal usaha, Lahan dan yang terpenting adalah pasar karena banyak petani yang kesulitan dalam pemasaran jangan sampai Program Kementan setiap tahun tidak ada perubahan.
  
19. Telah lahir Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, namun di PERPRES tersebut tidak melibatkan Kementerian Pertanian, padahal posisi kementan sangat penting untuk mencegah stunting, kami minta penjelasan?
  
20. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan insentif bagi penyuluh karna beban kerja dan wilayah kerja yang luas, disamping itu perlu ditingkatkan kegiatan bimtek khusus untuk penyuluh dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri  
Pertanian RI serta Eselon 1 Kementerian Pertanian RI**

Demikian masukan dan pertanyaan ini kami sampaikan dan Fraksi Partai Gerindra meminta agar kebijakan pemerintah terintegrasi dari hulu sampai hilir, jangan sampai program hanya pada aspeknya produksi saja tanpa memikirkan aspek distribusi dan pemasarannya, sejalan dengan manifesto perjuangan Partai Gerindra bahwa kebijakan pangan harus terintegrasi dan berpihak pada petani sehingga akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju dan berdaulat pangan.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| G. Budisatrio Djiwandono               | - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI |
| Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU | - Kapoksi                      |
| Renny Astuti, S.H., S.PN.              | - Anggota                      |
| Ir. H. TA Khalid, M.M.                 | - Anggota                      |
| Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.           | - Anggota                      |
| Dr. Ir. Hj. Endang S Thohari M.Sc.     | - Anggota                      |
| Ir. Dwita Ria Gunadi                   | - Anggota                      |